

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA MODAL PADA DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYSIS OF RECORDING AND REPORTING OF CAPITAL EXPENDITURE IN DIRECTORATE GENERAL OF PUBLIC WORKS DEPARTMENT NORTH SULAWESI

Oleh:

Estephany Gloria Sitepu¹

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

Estephany.sitepu62@gmail.com

Abstrak: Tuntutan Akuntabilitas dalam sistem pemerintahan semakin ditanamkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu tindakan aktivitas dan transaksi pemerintah yang baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara dan hanya membahas mengenai belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah apakah Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal dengan baik atau tidak (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terdapat penyajian akumulasi penyusutan dalam pelaporannya. Sebaiknya untuk tahun-tahun berikutnya, Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar Pengelolaan Keuangan dapat berwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Kata Kunci : analisis, pencatatan, pelaporan, belanja modal.

Abstract: Accountability demands increasingly embedded in the governance system to achieve good governance. In this case there needs to be an act of government activities and transactions that baik dengan measures are clear and can be summarized through the accounting process in the form of reports, so they can see everything that happened and that is contained in the space-government entity. This research was conducted at the Directorate-General (DG) of Human Settlements Office of Public Works (PU) of North Sulawesi province and only discuss about capital expenditure. The purpose of this study is whether the Directorate General of Cipta Karya Department of Public Works in the Province of North Sulawesi's recording and reporting of capital expenditures to whether or not (in accordance with Government Regulation No. 71 Year 2010 and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 Year 2013). The method used is the method deskriptif. Menggunakan secondary data source. The results showed that the Directorate General of Cipta Karya Department of Public Works North Sulawesi province has implemented financial management in accordance with Regulation No. 71 Year 2010 concerning Governmental Accounting Standards and Regulation No. 64 Year 2013 concerning Regional Financial Management and presentation of accumulated depreciation contained in its reporting. Better for the following years, the Directorate General of Cipta Karya Department of Public Works of North Sulawesi province, referring entirely to the Government Regulations set by the Government, so that financial management can be either effectively and efficiently and can be useful for users of financial statements.

Keywords : analysis, record, report, capital expenditure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut.

Jika selama ini pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah lebih ditujukan kepada pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi (provinsi atau pusat), maka dengan diberlakukannya reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus dilaporkan pemerintah daerah secara periode setiap semester mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa pada hakekatnya anggaran dikelola oleh pemerintah adalah milik masyarakat sudah semestinya ditujukan kepada pemiliknya (masyarakat) dan harus dibuat selengkap mungkin.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah seperti tanah dan bangunan merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Mangowal (2013) "belanja modal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti halnya dalam infrastruktur/sarana pelayanan publik sangat berpengaruh bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi".

Salah satu masalah dalam pendapatan dan belanja daerah adalah masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah juga akan mempengaruhi belanja daerah. Hal yang dinilai masyarakat dimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi belanja modal. Belanja modal antara lain berhubungan dengan masalah transportasi, orang, barang, dan jasa. Misalnya kualitas jalan (transportasi), perekonomian yang maju karena distribusi barang efisien jika sarana transportasi jalan memadai. Belanja modal juga berhubungan dengan bidang perhubungan melalui pembangunan jalan tol yang dapat meningkatkan perekonomian melalui akses jalan yang lebih efisien kepada masyarakat (Watusuke, 2014).

Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas PU merupakan salah satu pusat biaya yang ada di pemerintahan daerah yang telah dianggarkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebagai organisasi sektor publik yang bergerak dalam hal pembangunan, Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara juga menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan yang termasuk didalamnya membahas tentang anggaran. Pengendalian laporan keuangan sangatlah penting dilakukan oleh setiap Dinas di Sulawesi Utara agar supaya setiap anggaran yang ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Direktorat Jendral Cipta Karya dalam melakukan sistem dan prosedur, pengakuan, pencatatan dan pelaporan belanja modalnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian dan hasilnya. Sedangkan menurut Kieso (2008:2) akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Halim, dkk. (2012:36) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sebagai langkah awal dalam menjalankan proses akuntansi adalah mengenali sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan. Sistem informasi yang dimaksud meliputi sekumpulan

sumber daya yang dirancang sedemikian rupa untuk mengubah data menjadi informasi. Atau seperangkat prosedur formal yang berguna untuk mengumpulkan data, mengolahnya menjadi informasi dan mendistribusikannya kepada pemakai (Samryn:2015,3).

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP)

Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah lembaga tinggi Negara dan lembaga eksekutif) serta pemerintah daerah yang mendapat dana dari APBN (terkait dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan). Oleh karena itu, SAPP tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemerintah daerah (yang menggunakan APBD), lembaga keuangan Negara, serta BUMN/BUMD. PP No. 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian sistem akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan yang dapat menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan intern pemerintah bahkan untuk tujuan luar organisasi.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan social) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo:2009,2).

Akuntansi Aset Tetap

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pengukuran aset tetap menurut PSAP BA 01 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal (dikutip oleh Tanjung:2013,162)

Catat Aset Tetap Sesuai Karakteristiknya

Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak menyebutkan secara spesifik pengertian dari aset tetap, namun secara umum hampir semua nomenklatur aset diberi barang milik daerah dengan defenisi adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah (dikutip oleh Yusuf:2009,57)

Penelitian Terdahulu

Gahung (2012) melakukan penelitian berjudul : Analisis Pengakuan dan Pelaporan Atas Belanja Langsung pada Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pengakuan dan pelaporan atas belanja langsung sesuai dengan PP No.24 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 dalam Laporan Keuangannya. Syefira (2013) melakukan penelitian berjudul : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencatatan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan kota Manado telah sesuai dengan PP No.24 tahun 2005 yang mendorong tercapainya sistem pencatatan secara akrual di instansi pemerintahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu melakukan penelitian yang sama mengenai pencatatan dan pelaporan aset tetap. Perbedaannya yaitu, pada penelitian ini peneliti mengacu pada PP No.71 tahun 2010 dan Permendagri No.64 tahun 2013 sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan PP No.24 tahun 2005 dan Permendagri No.13 tahun 2006 sebagai acuan dan objek penelitiannya juga berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Ditjen Cipta Karya Dinas PU Manado dengan alamat jalan tikala area No. 80, Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2015.

Prosedur Penelitian

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.
3. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.
4. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara
2. Metode Dokumentasi
3. Media Elektronik dan Media Buku

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Ditjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan Satuan Kerja yang bergerak dalam bidang penataan lingkungan dan bangunan di Sulawesi Utara dalam hal ini Jalan, Irigasi, dan sarana prasarana lainnya.

Mekanisme Pencairan Dana Administrasi dan Belanja

Mekanisme Pencairan dan Pembayaran meliputi pembayaran melalui UP (Uang Persediaan) dan pembayaran LS (Langsung). Jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP yaitu :

1. Belanja Barang
2. Belanja Modal untuk pengeluaran honor tim, alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan asset.
3. Belanja lain-lain.
Belanja lain-lain dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jendral Perbendaharaan dan untuk DIPA pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

Pembayaran secara LS: Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga dan atau atas pembayaran dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang nilainya ditetapkan oleh menteri keuangan.

Mekanisme Pencairan dengan UP/TUP/GUP dan LS melalui tahapan proses sebagai berikut:

1. Proses pengajuan SPP
2. Proses pengajuan SPP dan Penerbitan SPM
3. Proses Penerbitan SP2D oleh KPPN
4. Proses Penyelesaian Tagihan.

Pencatatan Belanja Modal

Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara pembiayaan untuk kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta subsidi/ bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian halnya untuk memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari anggaran Pemerintahan Pusat dan sumber-sumber lain yang sah merupakan Barang Milik Negara.

PP No. 71 tahun 2010, dijelaskan bahwa pencatatan aset tetap di lembar muka neraca sebagai berikut :

Aset

Aset Tetap

Tanah	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx
Total Aset Tetap	xxx

Tabel 1. Neraca Tingkat Satuan Kerja

Nama Perkiraan	Jumlah
1	2
Aset	
Aset Tetap	
Peralatan dan Mesin	6,004,700,380
Gedung dan Bangunan	22,873,106,500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44,113,090,270
Aset Tetap Lainnya	773,249,000
Akumulasi Penyusutan	(17,989,945,483)
Jumlah Aset Tetap	55,774,200,667
Aset Tetap	55,774,200,667

Pelaporan Belanja Modal

Pelaporan Belanja Modal Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara dalam pembahasannya terdapat dalam laporan realisasi anggaran yang telah disusun sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan dilaporkan sebagai laporan pertanggungjawaban pada bidang yang bertanggungjawab dalam Laporan Keuangan.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
	I. Belanja Transaksi Kas	23,841,638,000	23,436,753,493	(404,902,507)	98,30
	Belanja Pegawai	206,520,000	189,410,000	(17,110,000)	91,72
	Belanja Barang	10,807,518,000	10,649,062,833	(158,455,167)	98,53
	Belanja Modal	12,027,600,000	11,798,262,660	(229,337,340)	98,09
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
	Subsidi	0	0	0	0
	Hibah	0	0	0	0
	Bantuan Sosial	800,000,000	800,000,000	0	100
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0
	II. Belanja Transaksi Non Kas	0	0	0	0
	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0
	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0
	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0
	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0
	Subsidi Non Kas	0	0	0	0
	Hibah Non Kas	0	0	0	0
	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0
	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0
	Jumlah Belanja (B I + B II)	23,841,638,000	23,436,735,493	(404,902,507)	98,03

Sumber: Laporan Keuangan Ditjen Cipta Karya SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Sulut

Realisasi belanja tahun 2013 adalah sebesar Rp 23.436.735.493 atau sebesar 98,03%. Realisasi tersebut ditetapkan setelah Perda Perubahan APBD sebesar Rp 23.841.638. Didalamnya dapat dilihat Anggaran Belanja Modal adalah sebesar Rp 12,027,600,000 dan terealisasi sebesar Rp 11,798,262,660 atau sebesar 98,09 % maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran yang telah dipakai sudah mendekati pemakaian sepenuhnya untuk merealisasikan dalam belanja modal.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013. Dalam hal pengakuan belanja modal Ditjen Cipta Karya mengakui belanja pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah. Aset yang diperoleh dari belanja modal menurut SAP No.2 dicatat sebesar biaya perolehan. Dalam hal ini Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja SNVT dan membuat serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban sama halnya dengan PP No.71 tahun 2010 yang mengakui belanja jika nilai yang disajikan dalam Neraca menggambarkan nilai perolehan yang diperoleh sampai sekarang termasuk dengan tambahan belanja modal tahun-tahun terakhir serta dalam Permendagri no.64 tahun 2013 mengakui belanja pada saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit perbendaharaan.

Dalam hal Pengukuran juga telah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 dengan Permendagri No.64 tahun 2013 yaitu Aset Tetap dicatat sesuai dengan pengeluaran kas dan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan jika ada terdapat sisa anggaran, maka akan digunakan ke periode tahun berikutnya. Dan untuk

pelaporan Ditjen Cipta Karya menyajikan informasi berupa laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan dilaporkan pada pihak yang bertanggungjawab.

PENUTUP

Kesimpulan

Pencatatan dan Pelaporan atas Belanja Modal pada Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

Saran

Saran yang diberikan kepada Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, kiranya untuk tahun-tahun berikutnya, hendaknya Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Provinsi Utara berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar Pengelolaan Keuangan dapat berwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gahung Yesi.2012.Analisis Pengakuan dan Pelaporan Atas Belanja Langsung Pada Kabupaten Minahasa Utara.Universitas Sam Ratulangi,Manado (Skripsi Tidak dipublikasikan). Hal. 78.
- Halim. 2007.*Akuntansi Keuangan Daerah(Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso E. Donald, Jerry. J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermedit edisis kedua belas jilid 1*. Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- Mangowal Jessy Christine.2013 .Pendapatan Daerah Pengaruhnya terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Volume 1 No. 04 Desember Tahun 2013 ISSN 2303-1174*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2918/2469> diakses pada 11 November 2015. Hal 1386-1396
- Mardiasmo.2009.*Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pemerintah RI. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2010. PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Samryn L.M.2015.*Pengantar Akuntansi Buku 2*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Syefira Anisaa.2013,*Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Manado*. (Skripsi tidak dipublikasikan). Hal.66.
- Tanjung Hafiz Abdul.2013,"*Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*". Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Yusuf M. 2011. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Watusuke Y.S. (2014),"*Analisis Belanja Modal dan Pelaporannya pada Dinas Kesehatan Kota Manado*".*Jurnal EMBA Vol. 2 No. 04 Desember 2014 ISSN 2303-1174*.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6219/5745> diakses pada 11 November 2015. Hal.74-80.